

**LAPORAN KINERJA
BALAI KARANTINA PERTANIAN
KELAS I BANJARMASIN
TAHUN 2017**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN
2017**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridhoNya Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Tahun 2017 selesai disusun.

LAKIN ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan, anggaran dan rangkuman pencapaian sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 yang dilaksanakan pada UPT Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin di Propinsi Kalimantan Selatan.

Berkat kebersamaan, kedisiplinan dan kerja keras dari seluruh jajaran serta optimalisasi terhadap sumber daya yang ada maka target-target yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang memuaskan.

Akhirnya, dari Laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu gambaran untuk digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Karantina Pertanian pada tahun-tahun berikutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Banjarmasin, Januari 2018

Kepala ,

drh. ACHMAD GOZALI, MM
NIP. 19620331 199103 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I.. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Susunan Organisasi	3
1.4. Wilayah Kerja	7
1.5. Landasan Hukum Operasional	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Arah Kebijakan dan Strategi	8
2.2. Visi dan Misi	9
2.3. Tujuan	10
2.4. Sasaran Kegiatan	10
2.5. Analisis Lingkungan Strategis	11
2.6. Program/Kegiatan Tahun 2017	15
2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Indikator Keberhasilan	19
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	20
3.3. Penjelasan/Analisis Atas Pencapaian Kinerja	20
3.4. Akuntabilitas Keuangan	30
BAB VI. PENUTUP	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Jumlah dan Komposisi BKP Kls. Banjarmasin Berdasarkan Jabatan Tahun 2017	5
2. Komposisi Pegawai BKP Kls I Banjarmasin Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
3. Komposisi Pegawai BKP Kls I Banjarmasin Berdasarkan Tingkat Golongan	6
4. Daftar Penempatan Pegawai BKP Kls I Banjarmasin Tahun 2017	7
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	17
6. Pencapaian Target Indikator Kinerja BKP Kls I Banjarmasin Tahun 2017	19
7. Daftar Sarana Prasarana (Gedung/Bangunan dan Peralatan Mesin) pada BKP Kls I Banjarmasin Tahun 2017	28
8. Data Realisasi dan Sisa Anggaran BKP Kls I Banjarmasin Tahun 2017	31

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi, tujuan, program, sasaran, dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin pada tahun yang akan datang.

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal pinang untuk membangun Karantina Pertanian adalah “Terwujudnya Karantina Pertanian Banjarmasin Yang Tangguh, Profesional, Modern dan Terpercaya“, dengan mengemban 6 (enam) misi :

- 1) Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan (OPTK)
- 2) Mendukung trwujudnya keamanan pangan
- 3) Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
- 4) Meningkatkan kualitas layanan publik
- 5) Mendukung keberhasilan program agribisnis dan ketahanan pangan nasional
- 6) Mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan karantina pertanian.

Dalam upaya mencapai dan mewujudkan visi dan misi tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin telah merumuskan dua sasaran kegiatan strategis yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tindakan karantina
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis telah

ditetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan (realisasi 103% dari target).
2. Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan (realisasi 112% dari target).
3. Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan (realisasi 112% dari target).
4. Persentase jumlah sertifikat ekspor yang di tolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan (0 % dari target 0 – 0,1%).
5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian realisasi 102,05%.
6. Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai (realisasi 100% dari target).

Input yang diperlukan untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara keseluruhan pada Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.13.999.636.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.919.260.056,- atau 99,43%.

Dari penjabaran di atas secara umum capaian kinerja sasaran kegiatan strategis Tahun 2017 telah tercapai/terrealisasi rata-rata diatas target yang ditetapkan. Selain itu, keberhasilan capaian sasaran strategis yang diukur dengan IKK tersebut menggambarkan semakin berperannya Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.

Berkenaan dengan capaian kinerja tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Banjarmasin, Januari 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mereformasi system penyelenggaraan pemerintah terus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendorong kearah perbaikan penyelenggaraan pemerintah.

Langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja, tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena SAKIP pada dasarnya merupakan system manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian

Kelas I Banjarmasin dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yang ditetapkan ditetapkan, dan juga merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kedudukan

Berdasarkan Peraturann Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, dan mempunyai

Tugas Pokok

Tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin menyelenggarakan fungsi :

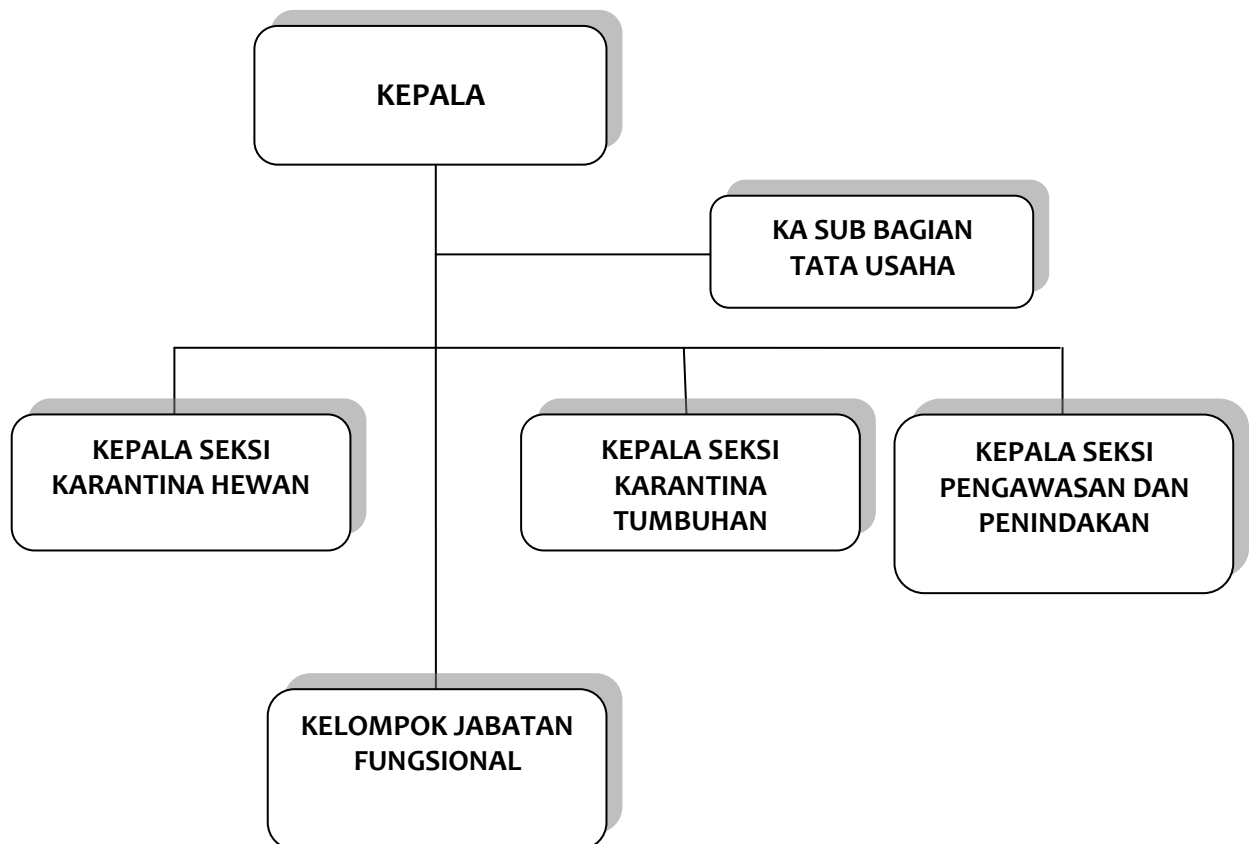
- 1) Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organism pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).
- 3) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.
- 4) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK.
- 5) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
- 6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan.
- 7) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
- 8) Pengelolaan system informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan.

- 9) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati.
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Karantina Tumbuhan, Seksi Karantina Hewan, Seksi Pengawasan dan Penindakan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.

BAGAN/STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN



Tugas pokok jabatan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
- 2) **Seksi Karantina Hewan**, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, sarana teknik, pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani
- 3) **Seksi Karantina Tumbuhan**, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, sarana teknik, pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
- 4) **Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan**, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.
- 5) **Kelompok Jabatan Fungsional**, terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).
 - Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemunahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK)
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK
 - c. melakukan pembuatan koleksi HPHK
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani

- e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemunahan dan pembebasan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK
 - c. melakukan pembuatan koleksi OPTK
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati nabati
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam menjalankan tupoksinya BKP Kelas I Banjarmasin didukung oleh pegawai sebanyak 70 orang (per 31 Desember 2017). Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, pendidikan, dan golongan pada BKP Kelas I Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I
Banjarmasin Berdasarkan Jabatan
Tahun 2017

No	Uraian Nama Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	5 orang
	-Kepala Balai	1 orang
	-Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
	-Kepala Seksi Karantina Hewan	1 orang
	-Kepala Seksi Karantina Tumbuhan	1 orang
	-Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan	1 orang
2	Jabatan Fungsional KT	26 orang
	1) POPT Ahli Madya	1 orang
	2) POPT Ahli Muda	3 orang
	3) POPT Ahli Pertama	8 orang
	4) POPT Penyelia	1 orang
	5) POPT Pelaksana Lanjutan	1 orang
	6) POPT Pelaksana	8 orang
	7) Calon POPT Ahli	3 orang
	8) Calon POPT Trampil	1 orang

3	Jabatan Fungsional KH	27 orang
	1) Medik Veteriner Madya	-
	2) Medik Veteriner Muda	7 orang
	3) Medik Veteriner Pertama	-
	4) Paramedik Veteriner Penyelia	3 orang
	5) Paramedik Veteriner Lanjutan	4 orang
	6) Paramedik Veteriner Pelaksana	8 orang
	7) Calon Paramedik Veteriner	5 orang
4	Jabatan Fungsional Umum	12 orang
	Penghimpun dan Pengolah Data	1 orang
	Bendahara Penerima	1 orang
	Bendahara Pengeluaran	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang
	Pengadministrasi Kepegawaian	1 orang
	Pengadministrasi dan Penyaji Data	1 orang
	Arsiparis	1 orang
	Petugas SAK	1 orang
	Petugas SIMAK BMN	1 orang
	Penatausaha BMN	1 orang
	Pembuat Daftar Gaji	1 orang
	Jumlah pegawai	70 orang

Tabel 2
Komposisi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017

S2	S1	D3	SLTA	Jumlah
11 orang	21 orang	6 orang	32 orang	70 orang

Tabel 3
Komposisi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Pangkalpinang
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2017

IVb	IVa	IIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa	Jlh
1	2	12	9	11	9	4	10	7	5	70

Tabel 4
Daftar Penempatan/Penyebaran Pegawai
Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
Tahun 2017

No	Lokasi/Wilker	Jumlah
1	Balai dan Wilker Pelabuhan Trisakti	46 orang
2	Wilker Bandara Syamsudin Noor	15 orang
3	Wilker Pelabuhan Batu Licin	5 orang
4	Wilker Pelabuhan Kotabaru	4 orang
	Jumlah	70 orang

1.4. Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 44/Permentan/OT.140 /3/2014 tanggal 2 April 2014, jangkauan wilayah Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin meliputi 4 (empat) wilayah kerja, yaitu: Wilayah Kerja Pelabuhan Trisakti, Wilayah Kerja Bandara Syamsudin Noor, Wilayah Kerja Pelabuhan Batulicin, dan Wilayah Kerja Pelabuhan Kota Baru.

1.5. Landasan Hukum Operasional

1. UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2. PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan
3. PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan
4. Peraturan Menteri Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
5. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
6. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
7. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perkarantinaaan
8. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Pengawasan dan Kepatuhan Kegiatan Perkarantinaaan Hewan dan Tumbuhan
9. Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin terkait dukungan manajemen dan teknis.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan operasional dan strategi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin berpedoman Misi yang dibangun Badan Karantina Pertanian yang tertuang dalam Renstra Barantan 2015-2019. Arah Kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin untuk lima tahun ke depan adalah:

1) Memperkuat sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang modern, tangguh dan terpercaya melalui strategi :

2) Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- Peningkatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan dan keamanan hayati.
- Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium
- Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan IT perkarantinaan;
- Peningkatan dukungungan manajemen dan teknis
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana).
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan perkarantinaan.

Secara terukur dijabarkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tindakan karantina
- b. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai

2.2. Visi dan Misi

Visi

Komitmen Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin untuk membangun Karantina Pertanian adalah : “Terwujudnya Karantina Pertanian Banjarmasin yang Tangguh, Profesional, Modern dan Terpercaya “

Penentuan Visi tersebut didasarkan pada landasan Rencana Strategis dan arah kebijakan pembangunan perkarantinaan BARANTAN, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2015 – 2019.

Tangguh dimaknai :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya dimaknai :

Keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin perlu mendapat kepercayaan (*trust*) yang tinggi.

Profesional dimaknai :

SDM Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dalam melaksanakan tugas memiliki kemampuan yang tinggi dan senantiasa berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan

Modern dimaknai :

Teknik, metode dan sumber daya pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin senantiasa mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman

Misi

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin mengemban misi berikut :

- 1) Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan (OPTK)
- 2) Mendukung terwujudnya keamanan pangan
- 3) Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
- 4) Meningkatkan kualitas layanan publik
- 5) Mendukung keberhasilan program agribisnis dan Ketahanan Pangan Nasional
- 6) Mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan karantina pertanian.

2.3. Tujuan

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK
4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
5. Mewujudkan pelayanan prima

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tindakan karantina
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai
Peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK diperlukan dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin,

mengingat besarnya ancaman dan risiko berbagai jenis HPHK dan OPTK yang dapat masuk dan tersebar ke wilayah Propinsi Kalimantan Selatan sekitarnya, sehingga diperlukan implementasi yang konsisten dalam pelaksanaan dan efektivitas tindakan karantina.

Peningkatan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor/impur media pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan perkarantinaan yang maksimal sesuai dengan standar internasional. Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian diperlukan dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keamanan produk pertanian kepada masyarakat Indonesia dan negara mitra sesuai tata aturan internasional.

2.5. Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area yang terkait dengan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sebagai berikut :

1) Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Dari aspek kebijakan/regulasi telah memiliki peraturan perundang – undangan yang memadai sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Barantan, Juklak dan Juknis.
- 2) Karantina merupakan salah satu dari 3 unsur teknis *Custom, Imigration and Quarantine* (CIQ) berdasarkan ketentuan international (Annex IX) bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu negara

- 3) Memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina
- 4) Telah memiliki Standar Pelayanan Publik yang telah diakui oleh Ombudsmen RI serta komitmen dari pimpinan dan pegawai untuk meningkatkan kualitasnya.
- 5) Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu pelayanan ISO 9001:2008, Standar Akreditasi Laboratorium ISO 17025 : 2005, dan Standar Pelayanan Publik sehingga proses bisnis organisasi dapat dijalankan dengan efektif.
- 6) Mempunyai sarana dan prasarana operasional utama yang mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina.
- 7) Dari aspek penganggaran, selain APBN Rupiah Murni Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebagian dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.
- 8) Dengan status kedudukan sebagai unit kerja eselon III maka koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih mudah dan cepat.

a. Kelemahan

- 1) Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan
- 2) Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja disebabkan masih terbatasnya SDM yang ada, baik jumlah

maupun kualifikasinya dalam rangka mengintensifkan kegiatan tindakan karantina di wilayah kerja lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.

- 3) Kualifikasi dan kompetensi SDM belum merata dan masih diperlukan peningkatan.
- 4) Sarana/prasarana operasional perlu penataan dan peningkatan kualitas sesuai peruntukannya dan standar
- 5) Belum semua sarana pelayanan memenuhi standar minimal
- 6) Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal
- 7) Masih terbatasnya alokasi anggaran dari Pusat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.

2) Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Dengan semakin dibatasinya penggunaan berbagai bentuk subsidi, tarif, dan ketentuan tata niaga yang dianggap sebagai sarana restriksi pasar maka ketentuan teknis yang menyangkut karantina dan keamanan pangan menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional, khususnya perdagangan komoditas pertanian,
- 2) Peningkatan jumlah konsumen produk pertanian domestik, regional maupun dunia.
- 3) Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas dan berbagai kesepakatan (MOU) antar negara dan telah terintegrasinya perdagangan dunia atau antar kawasan.
- 4) Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai instrument perdagangan dunia.
- 5) Adanya fokus pemerintah pada RPJM 1015-2019 untuk mengatasi krisis pangan, dan target swasembada pangan.

- 6) Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO
- 7) Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan hewan dan tanaman (pencegahan, diagnosis dan pengobatan)
- 8) Kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dukungan yang kuat bagi peningkatan dan pengembangan karantina pertanian,
- 9) Fungsi penyelenggaraan karantina masih kewenangan pemerintah pusat.
- 10) Dengan ditetapkannya karantina sebagai fungsi dan kewenangan Pemerintah Pusat maka pelaksanaan karantina pertanian di seluruh Indonesia mempunyai dasar hukum dan pembinaan yang sama yaitu Badan Karantina Pertanian, sehingga pelaksanaannya tidak dibatasi oleh daerah administrasi.

b. Tantangan

- 1) Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk-produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama, terutama terkait dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS).
- 2) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan
- 3) Kebijakan proteksi dari negara mitra
- 4) Standarisasi produk pertanian dari negara pengimpor
- 5) Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional untuk produk pertanian
- 6) Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi pertanian yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit
- 7) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati

- 8) Adanya kebijakan *zoning* dalam importasi produk hewan (daging)
- 9) Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas
- 10) Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara
- 11) Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK & OPTK
- 12) Adanya bioterorisme.
- 13) Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetik (*Genetically Modified Organism/GMO*)
- 14) Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk.
- 15) Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas dunia dan MEA
- 16) Meningkatnya tuntutan masyarakat khususnya para pengguna jasa karantina atas pelayanan prima (tranparansi dan efisiensi).
- 17) Meningkatnya volume, kompleksitas dan frekuensi lalulintas media pembawa OPTK/HPHK baik impor, ekspor maupun antar area,
- 18) Masih banyaknya pintu – pintu masuk dan keluar yang tidak resmi yang belum dapat dijangkau pengawasannya.

2.6. Program/Kegiatan Tahun 2017

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin menyesuaikan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BARANTAN yaitu “Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan pengawasan Keamanan Hayati”.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut , sesuai dengan pedoman penetapan Program dan Kegiatan yang diterbitkan oleh BARANTAN, maka kegiatan utama BKP Kelas I Banjarmasin adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati”. Yang selanjutnya dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya tindakan karantina , indikatornya adalah :

- Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan;.
- Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
- Persentase jumlah sertifikat ekspor yang di tolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran 2 : Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai, indikatornya adalah :

- Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.

2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Manfaat khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk : (1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi (2) Melaporkan capaian kinerja organisasi (3) Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dengan Badan Karantina Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 PERJANJIAN KINERJA BADAN KARANTINA PERTANIAN

**UPT : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN
Tahun Anggaran : 2017**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tindakan Karantina	- Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan	96%
	- Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan	88%
	- Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan	88%
	- Persentase jumlah sertifikat ekspor yang di tolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan	0 – 0,1 %
	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
Tersedianya sarana dan prasarana perkarantina yang memadai	- Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.	100%

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati = Rp.13.999.636.000,-

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BKP Kelas I Banjarmasin dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan, dalam hal ini pengukuran kinerja. Untuk menguatkan pencapaian sasaran kegiatan tersebut disusunlah

perjanjian kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam hal ini antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Kepala BKP Kelas I Banjarmasin untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dalam format yang mencantumkan sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) organisasi, dan target kinerja.

Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran kegiatan sesuai dengan IKK. Perjanjian kinerja BKP Kelas I Banjarmasin yang telah ditandatangani baru sebatas pada target capaian *output*.

Perjanjian Kinerja BKP Kelas I Banjarmasin Tahun 2017 telah menetapkan target kinerja berupa indikator *output* dan besaran target *output*-nya yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur adalah indikator kinerja *input* (rencana/anggaran keuangan) dan *output*.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Indikator Keberhasilan

Pencapaian target dari masing-masing Indikator kinerja yang

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan yang dicapai Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin pada Tahun 2017 secara rinci dapat diuraikan pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN
TAHUN 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Target
Meningkatnya tindakan Karantina	1. Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan	96%	98,91%	103%
	2. Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan	88%	100%	112%
	3. Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan	88%	100%	112%
	4. Persentase jumlah sertifikat ekspor yang di tolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan	0 - 0,1%	0 %	0 %
	5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83,68	102,05%

Tersedianya sarana dan prasarana perkarantina yang memadai	6. Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.	100%	100%	100%
--	---	------	------	------

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target yang harus dicapai, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana terlampir.

Selanjutnya dari aspek hasil pengukuran kinerja anggaran, pada Tahun 2017 secara umum Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin telah dapat mencapai keberhasilan yang memuaskan dengan realisasi anggaran sebesar 99,43%.

3.3. Penjelasan/Analisis Atas Pencapaian Kinerja :

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, capaian untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) **IKK 1 : Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan.**

Pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Target
Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan	96%	98,91%	103%

Pencapaian target :

Media Pembawa	Jumlah Permohonan	Jumlah Sertifikasi	Persentase (%)
MP HPHK	-	-	-
MP OPTK	92	91	98,91
Jumlah	92	91	98,91

2) IKK.2 Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan.

Pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Target
Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan	88%	100%	112%

Pencapaian target :

Media Pembawa	Jumlah Permohonan	Jumlah Sertifikasi	Persentase (%)
MP HPHK	11.332	11.332	100
MP OPTK	10.795	10.795	100

Jumlah	22.127	22.127	100
--------	--------	--------	-----

3) IKK.3 Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Target
Persentase media yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan telah ditetapkan	88%	100%	112%

Pencapaian target :

Media Pembawa	Jumlah Permohonan	Jumlah Sertifikasi	Persentase (%)
MP HPHK	8.511	8.511	100
MP OPTK	211	211	100
Jumlah	8.722	8.7.22	100

Capaian IKK tersebut diukur berdasarkan jumlah permohonan sertifikasi MP HPHK/OPTK yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan baik impor maupun antar area dibandingkan jumlah sertifikat yang diterbitkan di lingkup BKP Kelas I Banjarmasin selama tahun 2017.

Sertifikasi kesehatan karantina merupakan cerminan hasil layanan kepada masyarakat atas tindakan karantina pertanian yang telah dilakukan, sesuai peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan serta merupakan dokumen pengakuan pertanggung jawaban dan jaminan keakuratan bahwa media pembawa terbebas

dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Berdasarkan capaian kinerja pada IKK 1, 2, dan 3 di atas menjelaskan bahwa sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan terealisasi melebihi yang ditargetkan. Kuantitas dan frekuensi kegiatan sertifikasi tidak lepas dari pengguna jasa karantina yang melalulintaskan media pembawa OPTK/HPHK pada tahun berjalan. Pada Tahun 2017 secara keseluruhan lalulintas media pembawa HPHK dan OPTK yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi dapat dilihat pada matrik berikut :

No	Uraian	Jumlah Permohonan	Jumlah Sertifikasi	Persentase (%)
1	Impor			
	MP HPHK	-	-	-
	MP OPTK	92	91	98,91
	Jumlah	92	91	98,91
2	Antar Area Masuk			
	MP HPHK	11.332	11.332	100
	MP OPTK	10.795	10.795	100
	Jumlah	22.127	22.127	100
3	Antar Area Keluar			
	MP HPHK	8.511	8.511	100
	MP OPTK	211	211	100
	Jumlah	8.722	8.722	100
	Total Keseluruhan	30.941	30.940	

Secara kuantitatif, kegiatan operasional karantina dan pengawasan keamanan hayati Tahun 2017 telah dilakukan sertifikasi sebanyak 30.940 sertifikat. Apabila dilihat dari frekuensi dan jumlah media pembawa yang dilalulintaskan seluruhnya dapat disertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pencapaian kinerja pada indikator kinerja 1, 2, dan 3

dapat dicapai melampaui target dalam Perjanjian Kinerja.

Cakupan dari indikator kinerja ini adalah bertumpu kegiatan operasional karantina pertanian penegakan pengawasan dan penegakan peraturan di bidang karantina pertanian. Penguatan operasional karantina pertanian sebagai langkah strategis dalam upaya, melakukan pencegahan dan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari luar negeri maupun penyebarannya di wilayah Republik Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya,

Selain itu, dalam rangka penegakan pengawasan dan penegakan peraturan di bidang karantina pertanian, pada tahun 2017 BKP Kelas I Banjarmasin berhasil menggagalkan pemasukan Hewan dan Produk Hewan yang tidak dilengkapi dengan dokumen karantina sebanyak 24 kali. Terhadap hewan dan produk hewan tersebut dilakukan penahanan, penolakan, dan pemusnahan. Tindakan Penahanan yang dilanjutkan Penolakan hewan sebanyak 23 kali dengan volume 50 ekor dan HBAH sebanyak 1 kali dengan volume 10 kilogram kemasan. Tindakan Penolakan terhadap media pembawa yang masuk berupa hewan sebanyak 16 kali dengan volume 33 ekor. Tindakan karantina Pemusnahan sebanyak 9 kali dengan volume 27 ekor.

Untuk tindakan karantina tumbuhan, Pada tahun 2017 ini BKP kelas I Banjarmasin melakukan tindakan pemusnahan media pembawa impor berupa daun kering (hasil tanaman) dari negara Afrika. Media pembawa ini tidak dilengkapi dengan sertifikat daerah asal yang pada akhirnya setelah mejalani proses penolakan dan penolakan akhirnya dimusnahkan.

Dengan demikian seluruh MP HPHK/OPTK yang dilalulintaskan baik impor, antar area masuk maupun antar area keluar di wilayah Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi

karantina telah dapat direalisasikan, outputnya melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

4) IKK.4 Persentase jumlah sertifikat ekspor yang di tolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Target
Persentase jumlah sertifikat ekspor yang di tolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan	0 – 0,1%	0%	0%

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan membandingkan antara target dengan capaian realisasi jumlah sertifikat ekspor yang di tolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan internasional salah satu peran Badan Karantina Pertanian adalah memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor. Dalam Pelaksanaannya, pada tahun 2017 tidak ditemukan/ada satu pun penolakan terhadap barang ekspor yang dilalulintaskan dan disertifikasi melalui Wilayah Kerja lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Hal ini dibuktikan tidak adana *notice of compliance company* (NCC) dari negara tujuan terhadap barang kiriman dari Indonesia. Dengan demikian persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi. Dari uraian tersebut maka pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan ini dapat direalisasikan sesuai yang ditargetkan yakni 0% .

5) IKK 5 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Analisa capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83,68	102,05%

Capaian IKK ini diukur berdasarkan target nilai IKM yang ditetapkan dengan dengan capaian hasil pengukuran IKM tahun 2017 atas pelayanan dilaksanakan di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.

Dalam rangka akuntabilitas pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur Negara bidang pelayanan publik melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: 81/1995, yang menyebutkan bahwa layanan prima adalah layanan yang memberikan kepuasan pelanggan. Lebih lanjut keputusan tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 4/M/PAN-RB/03/2012 tentang pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik.

Kebijakan tersebut dibuat dalam merespon keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang ada di semua unit pelayanan milik pemerintah tak terkecuali Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Pelayanan publik oleh aparatur negara dewasa ini telah menjadi isu strategis, karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparatur negara.

Untuk mengetahui pelayanan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin diperlukan suatu penilaian kepada

masyarakat/pengguna jasa yaitu dengan melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat di masing-masing wilayah kerja lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Tahun 2017 capaian nilai indeks adalah 83,68. Dengan demikian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin masuk dalam kategori interval IKM antara 81,26 – 100 dengan simpulan bahwa mutu pelayanan adalah **A**, dengan kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**.

Dari uraian tersebut maka pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan ini dapat direalisasikan sesuai yang ditargetkan yakni 102,05% .

6) IKK 6 : Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.

Pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Target
Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai	100%	100%	100%

Dalam rangka mewujudkan Visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin maka pelayanan karantina tumbuhan dan karantina hewan perlu difasilitasi dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai akan memberikan motivasi, semangat kerja serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga upaya pelaksanaan tupoksi pencegahan OPTK dan HPHK terhadap MP yang keluar dan masuk di wilayah kerja BKP Kelas I Banjarmasin dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana dan sarana yang direalisasikan pada

tahun 2017 dibanding dengan target capaian dalam RKKAL/DIPA TA 2017..

Untuk pengadaan sarana dan prasarana pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sesuai dengan alokasi DIPA Tahun 2017. Pengadaan sarana dan sarana tersebut secara keseluruhan dapat direalisasikan 100%. Secara rinci pengadaan sarana dan prasarana tersebut tersaji pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Daftar Sarana dan Prasarana
(Gedung/Bangunan dan Peralatan Mesin) Pengadaan Tahun 2017
Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

N O	NAMA BARANG	MERK / TYPE	JUMLAH
PERALATAN DAN MESIN			
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	Suzuki Ertiga Daihatsu Terios	1 Unit 1 Unit
2	Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Supra X	7 Unit
3	Alat Pengolah Data	PC All In One Dell Laptop Dell Scanner Portable Fujitsu Printer Brother	8 Unit 1 Unit 2 Unit 6 Unit
4	Perangkat Komunikasi HT dan Radio RIG	Radio HT ICOM Radio RIG Kenwood	25 Unit 4 Unit
5	Peralatan Teknis dan Laboratorium	Alat Lab Centrifuge Exhouse Fan Meja Kubikal Worksheet Lab	1 Unit 1 Unit 1 Paket
6	Pengadaan Alat Teknis Lapangan	Handycam Panasonic Camera DSLR Canon 750 D	1 Unit 1 Unit
7	Pengadaan Fasilitas Pendukung Perkantoran 1. Mesin Absensi 2. Alat Pemadam Api 3. Lemari Es / Kulkas 4. Layar Monitor / TV 5. Dispenser 6. Trolley 7. Proyektor Ruang Rapat 8. Mesin Fax	Omega AC - 101 Apar Powder Sharp SJ - 235 LED Panasonic Sharp SWD - 80 EHL Krisbow KW 05 dan Platform Hand Maxtor Screen Panasonic	4 Unit 6 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit
8	Pengadaan AC 1. AC Wilker Batulicin (1 PK 4 Unit + 1,5 PK 1 Unit) 2. AC Kantor Balai Induk (1 PK 2 Unit + 1,5 PK 3 Unit) 3. AC Sy Noor (1 PK 2 Unit + 1,5 PK 3 Unit)	Panasonic CS YN9K (4) Panasonic CS PN12RKJ (1) Panasonic CU-UV9SKP (2) Panasonic CS-PN12SKJ (3) Panasonic Panasonic	5 Unit 5 Unit 5 Unit
9	Pengadaan Genset Wilker Sy Noor	Diesel HD 20KV _a Silent	1 Unit

		Perkins	
10	Pengadaan Meubeulair 1. Pengadaan Meubeulair Wilker Trisakti Meja Kerja Direktur Lemari Buku Meja Kerja Rapat Kursi Tamu Kursi Kerja Lemari Kaca Meja Kayu Meja Konter Lab Lemari Koleksi 2. Pengadaan Meubeulair Wilker Batulicin Meja Kerja Kursi Kerja Kursi Tunggu Pelayanan Lemari Arsip Lemari Kaca	Indachi HPL DR Indachi DR HC 3 Grand Furniture Indachi Vere Indachi D21 Custom Custom Custom Custom Grand Furniture Indachi Flo II n Indachi PS 53 M Airbus Custom	1 Unit 1 Unit 1 Set 1 Set 5 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Set 1 Unit 5 Unit 13 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Set
	3. Pengadaan Meubeulair Wilker Sy Noor Meja Workstation Meja Pj Wilker Meja Kerja Senior Meja Rapat Kursi Kerja Besi Kursi Susun Meja Counter Pelayanan Pengadaan Lemari Backdrope Pengadaan Meja Pemeriksaan Pengadaan Kursi Besi Kursi Tunggu Pelayanan Sofa L	Custom Custom Custom Grand Furniture Indachi Siantano Custom Custom Custom Custom Flo IN - -	1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 15 Unit 15 Unit 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 16 Unit 1 Unit 1 Unit

GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	PEKERJAAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
1	TANAH	Pengurukan dan Pematangan Tanah IKH Batulicin	1 Paket
2	TANAH	Pembuatan Jalan IKH Wilker Batulicin	558 m2
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perluasan Gedung Kantor Wilker Sy Noor Banjarbaru	150 m2
4	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehab Mess Kantor Induk BKP Kelas I Banjarmasin	70 m2
5	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Rumah Jaga Pelayanan Wilker Batulicin	45 m2
6	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gudang Genset Bandara	6 m2
7	GEDUNG DAN BANGUNAN	Penyekatan Ruang Pelayanan Kantor Balai	1 Paket
8	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pengadaan Backdrop Kantor Balai	1 Paket
9	GEDUNG DAN BANGUNAN	Penyekatan Ruang Laboratorium	1 Paket
10	JARINGAN LISTRIK	Pemasangan Jaringan Listrik Kandang Mantuil	1 Paket

11	JARINGAN LISTRIK	Rehab Jaringan Listrik Laboratorium	1 Paket
12	JARINGAN LISTRIK	Penambahan Daya Listrik Kantor Balai	1 Paket

Hasil Keluaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan sarana dan sarana di atas apabila dikaitkan dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati akan bermanfaat :

1. Menunjang kelancaran penyelenggaraan karantina pertanian di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Semakin melengkapi sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung operasional pelayanan karantina pertanian di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Memperlancar sistem pelaporan operasional khususnya di Wilker lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.
4. Menunjang tindakan karantina yang cepat, tepat dan akurat karena didukung dengan tempat kerja yang memadai dan fasilitas yang tersedia mampu melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Tahun Anggaran 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dalam melaksanakan peran dan fungsinya mendapat dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp.13.999.636.000,- yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.12.237910/2017, dengan rincian:

-Belanja Pegawai	Rp. 4.538.269.000,-
-Belanja Barang	Rp. 5.546.011.000,-
-Belanja Modal	Rp. 3.915.356.000,-

Realisasi DIPA Tahun 2017 secara keseluruhan sebesar Rp. 13.919.260.056,- atau 99,43%. Dalam pelaksanaannya ada optimalisasi dan efisiensi dari pembiayaan beberapa kegiatan. Secara

global pagu, realisasi, dan sisa anggaran per belanja dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Data Realisasi dan Sisa Anggaran
Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
Tahun 2017

Kode	Jenis Belanja	Pagu DIPA		Realisasi		Sisa Anggaran	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
51	BELANJA PEGAWAI	4.538.269.000	100	4.526.427.690	99,74	11.841.310	0,26
52	BELANJA BARANG	5.546.011.000	100	5.479.282.816	98,80	66.728.184	1,20
53	BELANJA MODAL	3.915.356.000	100	3.913.549.550	99,95	1.806.450	0,05
	Jumlah	13.999.636.000	100	13.919.260.056	99,43	80.375.944	0,57

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.538.269.000,- yang telah digunakan untuk keperluan gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan pajak, tunjangan beras, belanja uang makan, tunjangan umum, dan belanja uang lembur. Untuk belanja ini secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp. 4.526.427.690,- atau hampir 99,74% dari pagu, sehingga terdapat sisa Belanja Pegawai sebesar Rp.11.841.310,- atau 0,26%.

Alokasi anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017 mengalami kenaikan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pengangkatan PNS dari CPNS, mutasi masuk, bertambahnya jumlah keluarga yang masuk tanggungan, kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan jabatan fungsional.

b. Belanja Barang

Pagu DIPA untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp. 5.546.011.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 5.479.282.816,- atau

98,80%. Belanja Barang ini antara lain digunakan untuk membiayai keperluan perkantoran yang meliputi belanja pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh pegawai, pengadaan pakaian dinas pegawai, pengadaan pakaian petugas laboratorium dan petugas satpam, pengadaan pas bandara, pemeliharaan/perawatan gedung dan instalasi kantor, pemeliharaan dan operasional sarana kantor, pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pengadaan perlengkapan kantor dan keperluan sehari-hari, honor yang terkait dengan operasional Satker, belanja langganan daya dan jasa, belanja operasional tata kelola kegiatan, sosialisasi karantina pertanian, koordinasi pelayanan dan pengawasan dengan instansi terkait serta belanja barang operasional mengikat lainnya dalam rangka mendukung tupoksi Balai Karantina Pertanian . Sisa anggaran Belanja Barang adalah sebesar Rp.66.728.184,- atau 1,20%.

c. Belanja Modal

Tahun 2017 plafon Belanja Modal yang dialokasikan dalam DIPA sebesar Rp.3.915.356.000,- terealisasi Rp 3.913.549.550,- atau 99,95%. Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4, alat pengolah data, alat komunikasi, peralatan teknis dan laboratorium, pengadaan alat komunikasi, pengadaan alat teknis dan laboratorium, pengadaan mebelair, pemasangan jaringan listrik pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, rehab gedung pelayanan Wilker Samsudin Noor, rehab gedung pelayanan Balai, rehab gedung laboratorium, pengurangan dan pematangan lahan IKH Wilker Batulicin, pembuatan jalan IKH Wilker Batulicin, pembangunan rumah jaga Wilker Batulicin, Rehap Mess, pembangunan rumah genset Wilker Samsudin Noor.

Sisa anggaran belanja modal sebesar Rp.1.806.450,- atau 0,05%, sisa anggaran ini dikarenakan terjadi penghematan dan optimalisasi terhadap realisasi anggaran belanja modal tersebut.

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Salah satu kelompok PNBP menurut Undang-undang tersebut adalah penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah. Dasar penetapan Tarif PNBP yang dipungut Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin selama Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 yang berlaku efektif mulai tanggal bulan Oktober 2016.

Tahun 2017 total PNBP Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sebesar Rp.2.701.173.053,- yang terdiri dari penerimaan fungsional dari sensor jasa karantina sebesar Rp. 2.603.126.294,- dan sewa rumah dinas sebesar Rp.296.580,- dari hasil penerimaan kembali belanja pegawai Rp.1.110.180,- dan pendapatan penjualan alat dan mesin Rp.96.639.999,-. Penerimaan tersebut seluruhnya telah disetorkan kembali ke Kas Negara.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan jasa karantina, masih merupakan kontributor/sumbangan terbesar dari seluruh penerimaan negara bukan pajak pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Fluktuasi penerimaan jasa karantina sangat berpengaruh terhadap pencapaian target. Selain itu fluktuasi penerimaan jasa karantina juga tidak terlepas dari frekuensi dan kuantitas/volume komoditi yang dilalulintaskan serta PP tarif yang berlaku.

Pada Tahun 2017, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari PNBP sebesar

Rp.910.950.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja barang dan belanja modal.

BAB IV PENUTUP

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin ini adalah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2017. Selain itu laporan ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya penyelenggaraan perkarantinaan yang baik.

Dari LAKIP ini dapat diketahui bahwa seluruh sumber daya yang ada di Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin telah dicurahkan secara maksimal dalam rangka berupaya untuk mengemban dan mewujudkan Visi ““Terwujudnya Karantina Pertanian Banjarmasin yang Tangguh, Profesional, Modern dan Terpercaya “

Program/kegiatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sebagai sasaran kinerja yang direncanakan mendapat alokasi anggaran Tahun 2017. Pada saat yang sama juga telah banyak kegiatan yang dilakukan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, yang secara keseluruhan mempunyai tingkat keberhasilan pencapaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,43% dari pagu yang ditetapkan.

Belajar dari pengalaman, kedepan dalam rangka meningkatkan kinerja perlu : 1) mengefektifkan kerja tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan; 2) meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait; 3) bertahap melengkapi sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

Beberapa keberhasilan yang telah dicapai merupakan suatu kebanggaan yang akan memotivasi staf dalam meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan, program dan sasaran strategis pembangunan perkarantinaan yang telah ditetapkan. Predikat Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sebagai instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertanian yang bebas dari korupsi akan terus dipertahankan.

